© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

HUBUNGAN BELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN (Studi Empirik Pada Tujuh Kabupaten dan Tiga Kota di Sumatera Barat)

SKRIPSI

ZULKI ANDRE AGUSTA
03157051

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama	:	**ZULKI ANDRE AGUSTA**
No. BP	:	03 157 051
Jenjang Pendidikan	:	(S1) Strata Satu
Jurusan	:	Akuntansi
Judul	:	**Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan (Studi Empirik Pada Tujuh Kabupaten dan Tiga Kota di Sumatera Barat)**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2010 sesuai dengan prosedur ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Oktober 2010

Pembimbing :

Dra. Husna Roza, Mcom Hons, Ak
NIP. 19750727 200112 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Jurusan Akuntansi
DR. H. Syafruddin Karimi, SE, MA	**DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak**
NIP. 19541009 198012 1 001	**NIP. 19600911 198603 1 001**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Oktober 2010

Zulki Andre Agusta
03 157 051

No Alumni Universitas	ZULKI ANDRE AGUSTA	No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 04 Agustus 1984 b). Nama Orang Tua : Yan Osman, dan Emmy Syarief c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 03157051 f). Tanggal Lulus : 14 Agustus 2010 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 2,70 i). Lama Studi : 6 tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua : Komp Permata Harbaindo Blok H2 No 14 Pampangan, Lubuk Begalung Padang

HUBUNGAN BELANJA MODAL DENGAN BELANJA PEMELIHARAAN
(STUDI EMPIRIK PADA TUJUH KABUPATEN DAN TIGA KOTA DI SUMATERA BARAT)

Skripsi S-1 Oleh : **Zulki Andre Agusta** Pembimbing : **Dra. Husna Roza, Mcom Hons, *Ak***

Abstrak

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan. Sehingga proporsi belanja modal yang besar akan mengakibatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya akan naik. Belanja pemeliharaan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan tidak memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Permasalahannya adalah bagaimana hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan di kabupaten/kota di sumatera barat selama tiga tahun (2006-2008). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dapat membuktikan hubungan yang signifikan antara belanja modal dan belanja barang terhadap belanja pemeliharaan, dengan kata lain menerima hipotesis nol (H_o) dan menolak hipotesis alternatif (H_a).

Keyword: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2010, dengan penguji :

Tanda Tangan	**1.**	**2.**
Nama Terang	**A. Rizal Putra, M.Si. Ak**	**Dra. Nini Syofriyeni, M.si, Ak**

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi : **DR. H. Yuskar, SE. MA, Ak** _____

NIP. 196009111986031001 TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan (Studi Empirik Pada Tujuh Kabupaten dan Tiga Kota di Sumatera Barat)** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata satu Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari doa, dukungan dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Papa** dan **Mama** tersayang, yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan, nasehat, do'a dan dukungan yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada kakak-kakakku yang selalu memberikan support kepada penulis.
2. **Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si. Ak**. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Ibu Dra.Husna Roza, Mcom Hons Ak**. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini.

6. **Bapak A. Rizal Putra, M.Si, Ak,** dan **Ibu Dra. Nini Syofriyenni, Msi, Ak** selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dalam ujian komprehensif serta atas saran-saran dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Fitri Yenny, terima kasih atas kesabaran, semangat, support, senyum, dan do'a nya dalam penulisan skripsi dan ujian komprehensif.
10. Teman Seperjuangan ku "Tigo Tungku Sajarangan" Andri dan Hendra, yang selalu ada mengisi hari-hari penuh gelak tawa dan perjuangan di kampus, semoga cepat menjadi orang sukses.
11. Nandes, Erik, Kaul, Redo, Donal, semoga cepat selesai skripsi nya dan wisuda. Semangat kawan-kawan!.
12. Sahabat-sahabat ku : Rini dan Bang Jek, serta Uda Anin, terima kasih atas support, saran, dan do'a nya.
13. Bang Deni gaek, Nanik, dan Sapta yang telah sama-sama berjuang dalam menghadapi kompre.

14. Teman-teman angkatan 03 jurusan akuntansi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
15. Kakak-kakak dan adik-adik **FE-PEUA** yang banyak membantu penulis selama menjalani studi.
16. Karyawan/ti PT. Ar Raffi Divisi Keuangan yang telah banyak membantu saat penulis magang.

Semoga Allah membalas semua pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GRAFIK viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 5

1.3 Pembatasan Masalah 6

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

1.4.1 Tujuan Penelitian 6

1.4.2 Manfaat Penelitian 6

1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis 8

2.1.1 Pengertian Belanja 8

2.1.2 Klasifikasi Belanja 9

2.1.3 Kelompok Belanja 12

2.1.4 Belanja Modal 17

2.1.5 Pengertian Asset 19

2.1.6 Komponen Biaya 21

2.1.7 Belanja Modal Swakelola 22

2.1.8 Belanja Pemeliharaan 23

2.2 Kajian Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan didaerah dan Pengembangan Hipotesis 25
2.2.1 Rencana Pemeliharaan Barang 25
2.2.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 27
2.2.3 Belanja Barang 28
2.2.4 Perencanaan Kebutuhan Penganggaran dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 29
2.2.5 Pengembangan Hipotesis 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian 35
3.1..1 Tipologi Penelitian 35
3.1.2 Pemilihan Sampel 35
3.2 Data 35
3.3 Variabel Penelitian 36
3.3.1 Jenis Variabel 36
3.3.2 Pengukuran Variabel 36
3.4 Model Operasional 36
3.5 Alat Analisis 37
3.5.1 Analisis Deskriptif 37
3.5.2 Pengujian Hipotesis 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Belanja Modal 40
4.2 Deskriptif Belanja Pemeliharaan 41
4.3 Pembahasan Pengujian Hipotesis 51
4.4 Uji Normalitas 51
4.5 Uji F-Stat 44
4.6 Uji T-Stat 45
4.7 Uji Koefisien Determinasi 45
4.8 Implikasi Penelitian 45
4.9 Perencanaan dan Pengendalian Belanja Pemeliharaan 46

4.10 Perbandingan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal
Di Kota Solok dan Kabupaten Solok 47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 51
5.3 Keterbatasan Penelitian 51

DAFTAR PUSTAKA x
LAMPIRAN 53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 43
Tabel 4.2 One sample Kolmogorov – Smirnov test 45
Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi 45
Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 46
Tabel 4.5 Hasil Uji F 48
Tabel 4.6 Belanja Modal Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2008 51
Tabel 4.7 Belanja Pemeliharaan Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2008 52
Tabel 4.8 Belanja Modal Kota Solok Tahun 2006 – 2008 52
Tabel 4.9 Belanja Pemeliharaan Kota Solok Tahun 2006 – 2008 53

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data Biaya Modal dan Biaya Pemeliharaan 57

Lampiran 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 58

Lampiran 3 Regression 59

Lampiran 4 Tabel Anova dan Coefficient 60

Lampiran 5 Residuals Statistics 61

Lampiran 6 Histogram 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang *Pemerintahan Daerah* dan *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat*. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi Pemda untuk mengelola keuangannya sendiri secara lebih efekif dan efisien dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Misi utama undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat keperintah daerah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi ***(Mardiasmo, 2002)***. Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan diseluruh daerah dengan, memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap ***(Shah, 1997)***

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan

dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah dengan menberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah ***(Halim, 2001).*** Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Di sisi lain dalam Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam Gambaran Umum Struktur Pengelolaan Keuangan Derah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efeisien dalam Permendagri No. 13/2006 adalah: efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangan

potensi daerah untuk peningakatan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh DAU dan PAD nya, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David ***Harianto*** dan ***Priyo Hari Adi (2007),*** bahwa belanja modal mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD dan DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Namun tidak dapat dipungkiri pula pada daerah dengan PAD rendah alokasi terhadap belanja modal menjadi lebih tinggi dibanding daerah dengan PAD yang tinggi. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan investasi di daerahnya, sehingga diharapkan adanya kenaikan PAD ditahun-tahun mendatang

Halim (2002:72) mengatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya belanja modal dibagi menjadi belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masya rakat umum. Contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans dan belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Definisi belanja modal di atas mempunyai kesamaan dimensi (dimensi investasi) dengan definisi belanja pembangunan. Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi daerah, yang selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya ***(Admin, 2007).***

Proporsi belanja modal yang besar akan mengakibatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya akan naik. Seperti yang dimuat dalam Bali

Post (27-11-2005), borosnya penggunaan fasilitas kendaraan mengakibatkan belanja pemeliharaan dan bahan bakar sangat besar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diminta untuk mengelola keuangannnya dengan efektif dan efisien.

Proporsi belanja modal yang besar seperti pembelian aset tetap dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan adanya kenaikan biaya pemeliharaan aktiva tetap dan infrastruktur tersebut. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja ***(Syaiful, 2006).***

Kenaikan alokasi belanja pada belanja modal menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi dalam bentuk aktiva tetap lainnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengeluarakan belanja rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan semua investasi dan infrastrukturnya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memelihara aset tetap dan infrastruturnya dalam APBD biasanya disebut Belanja Pemeliharaan ***(Bunari, 2004)***.

Namun disisi lain, beban pemerintah daerah semakin berat karena kenaikan harga-harga barang. ***Nugroho (1997)*** melakukan penelitian mengenai fenomena tumpang tindih antara belanja rutin dan belanja pembangunan dalam APBN, melalui pendekatan konsep konsumsi dan investasi sektor publik menyimpulkan bahwa kriteria rutin atau proyek pada dasarnya memerlukan ketegasan, kesamaan definisi dan visi para pihak terkait dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. ***Nugroho (1997)*** lebih lanjut menyimpulkan, meningkatnya anggaran

rutin akan selaras dengan hasil pembiayaan pembangunan, misalnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan atau pengeluaran untuk menunjang tugas-tugas aparatur dalam rangka memperlancar proses pembangunan. Oleh karena itu kenaikan anggaran rutin seperti belanja barang aparatur maupun publik dan belanja pemeliharaan aparatur maupun publik merupakan hasil dari pembiayaan pembangunan atau belanja modal itu sendiri.

Kota Solok adalah salah satu daerah di provinsi Sumatera Barat yang memiliki PAD rendah, sebagian besar belanja baik belanja aparatur Negara dan belanja publik diambil dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2007 dari Rp. 266.035.131.346,05 total belanja sebesar Rp. 221.836.482.939,50 diambil dari Dana Perimbangan dan sebesar Rp. 182.247.000.000,00 berasal dari DAU.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Dan penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul " ***Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan (Studi Empirik pada Tujuh Kabupaten dan Tiga Kota di Sumatera Barat)*** "

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan
2. Berapa besar hubungan belanja modal dengan pemeliharan

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini maka penulis membatasi masalah dengan menggunakan Belanja Modal belanja barang dan jasa dan Belanja pemeliharaan daerah di tujuh kabupaten dan tiga kota di Sumatera Barat untuk tahun 2006-2008. Dimana variabel-variabelnya adalah Belanja Modal dan Belanja pemeliharaan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota di Sumatera Barat.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi empiris, untuk memperlihatkan hubungan antara Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan.
2. Kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan.
3. Kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.5. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab yaitu, bab pertama berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sitematika penulisan. Bab kedua berisikan

review penelitian terdahulu, uraian tentang tinjauan pustaka yang berisikan pengertian belanja, klasifikasi belanja, kelompok belanja, belanja lansung dan belanja tidak langsung, belanja modal, perlakuan akuntansi belanja modal, belan pemeliharan, perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari objek, sampel, metode pemilihan sampel, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, teknik pengujian, dan penetapan hipotesis. Bab keempat berisikan analisa dan pembahasan yang meliputi hasil penelitian, dan pengujian statistik terhadap Ho dan Ha. Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran, implikasi penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang dilakukan oleh ***Priyo Hari Adi (2006)*** yaitu: Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) dan ***David Harianto*** dan ***Priyo Hari Adi (2007)*** yang meneliti tentang Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Penelitian mereka melihat hubungan dari beberapa variabel yang berbeda, diantaranya adalah variabel belanja modal, dan penelitian yang dilakukan oleh ***Bunari (2004)*** yang melakukan penelitian tentang Perbandingan Efiseinsi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Antara Pemerintah Kabupaten Solok Dengan Pemerintah Kabupaten Agam.

2.2. Landasan Teoritis

2.2.1. Pengertian Belanja

Belanja merupakan segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi equitas atau dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Klasifikasi belanja

Klasifikasi belanja dapat dibagi atas beberapa jenis belanja yaitu :

1. **Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan**

   Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah ini terdiri :

   *a. **Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:***

   - Pendidikan
   - Kesehatan
   - Pekerjaan umum
   - Perumahan rakyat
   - Penataan ruang
   - Perencanaan pembangunan
   - Perhubungan
   - Lingkungan hidup
   - Pertanahan
   - Kependudukan dan catatan sipil

- Pemberdayaan perempuan
- Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- Sosial
- Tenaga kerja
- Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- Penanaman modal
- Kebudayaan
- Pemuda dan olah raga
- Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- Pemerintahan umum
- Kepegawaian;
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Statistik
- Arsip
- Komunikasi dan informatika.

b. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Pariwisata
- Kelautan dan perikanan
- Perdagangan
- Perindustrian dan
- Transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dikiasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- Pelayanan umum
- Ketertiban dan ketentraman
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan budaya
- Pendidikan
- Perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program

klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2.3. Kelompok Belanja

Berdasarkan kelompok belanja, belanja dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung

1. **Belanja tidak langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas :

a. **Belanja pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pada :

- Beban kerja, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- Tempat bertugas, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil

- Kondisi kerja, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- Kelangkaan profesi, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- Prestasi kerja, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

d. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pemberian hibah dapat dibagi atas :

- Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian hibah dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain:

- Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah
- Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. **Bantuan Sosial**

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Belanja Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud harus didukung dengan buktibukti yang sah.

2. Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal

2.2.4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium

panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

- ***Belanja Modal Tanah***

  Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- ***Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- ***Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

  Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- ***Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan***

  Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan

pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- ***Belanja Modal Fisik Lainnya***

  Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2.5. Pengertian aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset

pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar padasaat perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.2.6. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tabel Komponen Biaya Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Kompenen Biaya yang Dimungkinkan dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan Tanah
	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
Bangunan	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan
	Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya
	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya
	Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya
	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya
	Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya
	Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya
	Belanja Modal Swakelola

2.2.7. Belanja modal swakelola

Belanja Modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki output berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-

bahan atau asistensi dan komponen biaya tersebut diatas diakui sebagai nilai perolehan aset tetap.

Pembagunan dan perolehan terhadap aset tidak bersifat final dan berkelanjutan dimana harus ada kesimbangan antara arus uang dan arus barang, maka menurut standar perlu ada perkiraan untuk melakukan pencatatan tersebut Perkiraan yang dimaksud adalah Kontruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi karena Belanja Modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan. Penyajian perkiraan dimaksud diikuti dengan memberikan penjelasan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian perkiraan Kontruksi Dalam Pengerjaan ini dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan Semester dan Jika pada akhir periode telah dilakukan penyelesaian dan telah diserahterimakan

2.2.8. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan yang rutin dikeluarkan oleh Pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja pemeliharaan rumah dinas
2. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas
3. Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
4. Belanja pemeliharaaan peralatan gedung kantor
5. Belanja pemeliharaan rumah jabatan
6. Belanja pemeliharaan jembatan

7. Belanja pemeliharaan jaringan irigasi
8. Belanja pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
9. Belanja pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
10. Belanja pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja dalam tatanan akuntansi pemerintah dikalsifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas laporan keuangan.

Jika terdapat belanja tersebut diatas yang memenuhi unsur kapitalisasi aset, maka nilai tersebut dimasukkan kedalam penambahan aset tetap yang disajikan dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang salah terhadap nilai aset. Belanja yang terjadi tetap

dicatat sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Penambahan nilai aset tersebut melalui prosedur Jurnal Aset dengan jurnal sesuai
dengan jenis aset yang bertambah.

Kenaikan alokasi belanja pada belanja modal menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan lebih berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan investasi dalam bentuk aktiva tetap lainnya..Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengeluarakan belanja rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan semua investasi dan infrastrukturnya

2.3.Kajian Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan di daerah dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Rencana pemeliharaan barang

Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat maca/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya.

Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dengan ketentuan :

a. Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya.
b. Menjadi bahan dalam menyususn APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang

c. Rencana Tahunan pememeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Untuk Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian maka Rencana Tahunan pemeliharaan Barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yan bersangkutan sebelum diajukan kepada pengelola melaui pembantu pengelola

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang ada di masing-masing SKPD. Pelasanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD

Setiap jenis barang milik daerah harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat:

a. Nama barang inventaris
b. Spesifikasinya
c. Tanggal perawatan
d. Jenis pekerjaan tau pemeliharaan
e. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan
f. Biaya pemeliharaan/perawatan
g. Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan
h. Lain-lain yang dipandang perlu

Pencataan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakuakan oleh pengurus barang. Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan abrang meliputi:

a. Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaaan oleh Panitian pemeriksa Barang
b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang
c. Pelaksanan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola melaalui pembantu pengelola

Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

2.3.2. Pemeliharaan barang milik daerah

Pemeliharaan barang milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalau dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemekaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakian maupun dari segi keindahan.

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa

a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai / pengurus barang tanpa membebani anggaran
b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran

c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhnnya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor:

a. Biologis
b. Cuaca, suhu dan sinar
c. Air dan kelembapan
d. Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, benturan, getaran dan tekanan
e. Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangikegunaan barang.

Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.

2.3.3. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja Barang antara lain dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori belanja yaitu:

1. Belanja pengadaan barang dan jasa.

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisai dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan.

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

3. Belanja Perjalanan.

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan.

2.3.4. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersedian barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. Perencanaan kebutuhan dan

pemeliharaan barang milik daerah berpedoaman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.

Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dana penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah terhadap tahapan kegiatan

pengelolaan barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik

Perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:

2. Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD sesuai besaran organisasi.
3. Adanya barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.
4. Adanya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan standar perorangan.
5. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif
6. Pertimbangan teknologi

Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/ketersediaan keuangan daerah. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyknya barang, nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan.

Kegiatan perencanaan Kebutuhan dan penganggaran meliputi:

1. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhun didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dengan memperhatikan hal-hal sebagi berikut, barang apa yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, bilamana dibutuhkan, berapa biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan, alasan-alasan kebutuhan, cara pengadaan

2. Membantu pengelola melaksankan koordinasi, menyipkan/menyusun dan menghimpun rencana klebutuhan barang nilik daerah untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD , Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standarisasi harga
3. Tahap kegiatan
    a. SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam RKA SKPD sebagai bahan penyusunan RAPBD
    b. Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
    c. Rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah
    d. Setelah APBD ditetapkan setiap setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
    e. Berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD diteliti dan dihimpun menjadi DKBMD untuk satu tahun anggaran.
    f. Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoaman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaaan barang milik daerah.

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal

dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

Barang milik daerah terdiri dari:

1. Barang yang dimilki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya berada pada SKPD/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Barang yang dimilik oleh Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya yang status barangnya dipisahkan

Siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi :

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- Pengadaan
- Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
- Penggunaan
- Penatausahaan
- Pemanfaatan
- Pengamanan dan pemeliharaan
- Penilaian
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Pembiayaan
- Tuntutan ganti rugi

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Secara umum yang mengelola barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- Kepala daerah
- Sekretaris daerah selaku pengelola barang
- Kepala SKPD
- Penyimpan barang
- Pengurus barang

2.3.5. Pegembangan Hipotesis

Dari kajian teori diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Belanja modal memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan

Ha : Belanja modal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

3.1.1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian tingkat eksplanatif yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan vrariabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

3.1.2. Pemilihan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, karena pengambilan sampel didasarkan pada tujuan penelitan. Penelitian ini menggunakan time series data dari tahun 2006-2008. Kabupaten dan kota yang dipilih masing-masing 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota selama 3 (tiga) tahun. Sehingga jumlah observasi 30 buah.

3.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data tersebut adalah data mengenai Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (*BPS*).

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Jenis variabel

Variabel penelitian ini adalah belanja modal dan belanja pemeliharan. selama tiga tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Dimana variabel independennya adalah belanja modal dan variabel dependent adalah belanja pemeliharaan.

3.3.2. Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diteliti adalah Belanja modal (X) dan Belanja Pemeliharan (Y). Pengukuran variabel bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan.

3.4. Model Operasional

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer yaitu dengan program ***SPSS***. Untuk menguji hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan digunakan model regresi linear. Model yang dibangun untuk penelitian adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + bx + e}$$

dimana :

y = Belanja Pemeliharaan

a = Konstanta

x = Belanja Modal

b = Koefisien Regresi

e = Error Term

3.5. Alat Analisis

3.5.1. Analisis Diskriptif

Analisis ini menggunakan alat-alat seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum dan standar deviasi. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang belanja modal dan belanja pemeliharaan. Untuk menguji hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan digunakan metode regresi linear seperti persamaan diatas.

3.5.2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diinginkan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik Agar model struktural equation modeling yang diajukan menunjukkkan persamaan hubungan yang valid, model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik *ordinary least square* (ols). Oleh karena itu pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Model yang digunkan menggunakan *Struktural Equation Modeling* (SEM), maka uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji sebagai berikut :

- ***Uji Normalitas***

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji terdistribusi secara normal atau tidak. Bila data yang diuji secara langsung terbukti tidak normal maka harus dilakukan perbaikan dengan menggunakan *logaritama natural*. Pengujian ini menggunakan pendekatan Kolmogorov - Smirnov (K – S) dan grafik normal P – P *of reggresion standarized* untuk menguji kenormalan data yang digunakan dalam peelitian. Normalitas data diukur nilai *critical ratio* (cr) uji atas kemencengan (*skewness*) maupun kemiringan data (*kurtosis*). Asumsi normal bila nilai uji tidak lebih atau sama dengan 2,58 atau lebih dari atau sama dengan -2,58 (***Hair dkk, 1998***).

Hipotesis yang ditetapkan tersebut akan diuji dengan menggunakan uji statistik sebagai berikut :

- ***Uji t stat***

Uji ini bertujuan untuk menguji secara potensial antara variabel independen yaitu belanja modal dan belanja barang terhadap variabel independen yakni Belanja Pemeliharaan.

Dengan mengasumsikan variabel kiri dianggap konstan dengan rumus sebagai brikut (***Arief ; 1999; 3***)

$$T = \frac{Bn}{SBn}$$

Dimana :

Bn = Koefisien regresi

SBn = Standar error masing-masing variabel

Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t dengan $\alpha = 5\%$, bila t hitung lebih besar dari t tabel berarti variabel tersebut signifikan, artinya terdapat pengaruh antara variabel yang bersangkutan dengan belanja pemeliharaan

- ***Uji Koefisien determinasi dan korelasi berganda (R^2)***

Uji ini bertujuan untuk melihat berapa proporsi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tak bebas, dengan rumus sebagai berikut ***(Gujarati; 1999; 45)***

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS = Jumlah total kuadrat

R^2 = Uji korelasi berganda dan koefisien determinasi

- ***Uji koefisien dan korelasi parsial (r)***

Uji ini bertujuan untuk melihat berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara terpisah dalam mempengaruhi variabel tak bebasnya dengan rumus (***Gujarati ; 1999; 45***)

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2 . n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

- ***Uji F stat***

Uji ini bertujuan untuk untuk menentukan signifikannya variabel bebas bersama-sama terhadap variabel tak bebas, dengan rumus sebagai berikut : (***Arief ; 1993; 10***)

$$F = \frac{R^2 \ / \ k\text{-}1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah baris

k = Jumlah variabel Independen

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan time series data dari tahun 2006-2008. Kabupaten dan kota yang dipilih masing-masing 7 (tujuh) kabupaten dan 3 (tiga) kota selama 3 (tiga) tahun sehingga jumlah observasi 30 buah.

4.1.1 Deskriptif Statistik

4.1.1.1 Deskriptif Belanja Modal

Tabel 4.1
Statistitik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	30	38491744.26	200481576.50	103027367.51	35528332.22
Belanja Pemeliharaan	30	5671682.34	50203488.12	23743827.370	10823205.66
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data diolah

Belanja Modal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan. Ini menunjukan bahwa selama periode tersebut pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan kata lain pemerintah Kota/Kabupaten lebih memperioritas pada tujuan yang telah ditetapkannya. Dari tabel 4.1 diketahui rata – rata belanja modal Pemeritah Kota/ Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 103.027.367,51 dengan standar deviasi Rp. 35.528.332,22. Belanja modal terendah

sebesar Rp. 38.491.744.26 yaitu di Kabupaten Agam pada tahun 2007 dan belanja modal tertinggi sebesar Rp. 200.481.576.50 yaitu di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2008.

4.1.1.2 Deskriptif Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan tahun 2006 hingga tahun 2008 dari keseluruhan pemerintah Kota/Kabupaten yang menjadi objek penelitian ini mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan belanja modal pemerintah Kota/Kabupaten secara keseluruhan. Ini memberikan indikasi bahwa pemerintah telah berupaya memgunakan belanja pemeliharaan yang dimiliki dengan semaksimal mungkin terhadap pemeliharaan aset yang dimiliki. Dari tabel 4.1 diketahui rata – rata Belanja pemeliharaan adalah sebesar Rp. 23.743.827,37 dengan standa deviasi Rp. 10.823.205,66. Belanja pemeliharaan terendah sebesar Rp. 5.671.682.34 yaitu di Kota Padang untuk tahun 2007 dan belanja pemeliharaan tertinggi sebesar Rp. 50.203.488.12 yaitu di Kabupaten 50 Kota untuk tahun 2008.

4.1.2 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisa regresi perlu dilakukan uji normalitas data. Menurut *Central Limit Theorem*, asumsi normalitas akan terpenuhi apabila jumlah sampel yang digunakan lebih dari atau sama dengan 25 (Mendenhall dan Beaver, 1992). Uji normalitas dilakukan guna melihat apakah variabel independen maupun variabel dependen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik. Selain itu juga dapat menggunakan *Uji Kolmogorov Smirnov*, dimana jika nilai sign > 0,5, maka dapat disimpulkan data variabel yang diuji tersebar dengan normal.

Tabel 4.2
One sample Kolmogorov – Smirnov test

Variabel	Sign	Keterangan
Belanja Modal	0.937	Normal
Belanja Pemeliharaan	0.648	Normal

Sumber : diperoleh dengan menggunakan program SPSS

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa untuk variabel belanja modal dan belanja pemeliharaan dalam penelitian ini memiliki nilai *asymp sign (2tailed)* lebih besar dari 0.05 yaitu 0.937 dan 0.648. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal

4.1.3 Analisa Regresi

Tabel 4.3
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Nilai	Standar error	t	p
Konstanta	7037355.088			
Belanja modal	.162	.049	3.327	.002

Sumber : diperoleh dengan menggunakan program SPSS

Dari tabel diatas persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 7.037.355,09 + 0,162\ x$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar Rp. 7.037.355,09 menunjukkan bahwa jika nilai belanja modal adalah tetap maka nilai belanja pemeliharaan adalah sebesar Rp. 7.037.355,09. Koefisien regresi belanja modal sebesar 0.162 mengindikasikan bahwa setiap nilai belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp. 1, maka nilai belanja pemeliharaan akan mengalami peningkatan sebesar 0.162. Koefisien regresi belanja modal bernilai positif, artinya adanya hubungan yang positif atau searah antara belanja modal dengan belanja

pemeliharaan, dimana semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula belanja pemeliharaan.

4.1.4 Pengujian Hipotesa

4.1.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien determinasi (R^2)

Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variable independent terhadap variable dependen secara serentak. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variable independe secara seretak terhadap variable dependen. Nilai R berkisar antara 0 samapi 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai R mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Tabel 4.4
Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532[a]	.283	.258	9324673.13

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

Dari tabel 4.4 diatas diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0.532, hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan.

Analisis determinasi dalam regresi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R < 1$), dimana jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka hasil regresi semakin baik, yang berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghazali: 2005, 45). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Dari tabel 4.4 diperoleh Nilai R^2 sebesar 0.283 menunjukkan pengaruh yang diberikan oleh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan artinya belanja odal mampu mempengaruhi belanja pemeliharaan sebesar 28.3%, sedangkan sisanya 71.7% (100%-28.3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Jika nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

4.1.4.2 Uji F

Pengujian F-stat bertujuan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependenya dengan baik. Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel 4.5
Hasil uji F

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.6E+014	1	9.625E+014	11.070	.002[a]
	Residual	2.4E+015	28	8.695E+013		
	Total	3.4E+015	29			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

Sumber : diperoleh dengan menggunakan program SPSS

Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian menunjukan bahwa F hitung sebesar 11.070 > dari F tabel sebesar 4.196 Dengan tingkat resiko *(level of signifikan)* 5 %, Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Dengan kata lain menerima Hipotesis Nol (Ho) dan menolak Hipotesis Altenative (Ha)

4.1.4.3 Uji T

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan belanja modal terhadap belanja pemeliharaan. Hasil analisis regresi pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai koefisien belanja modal memiliki nilai signifikan P < 0.05. Dimana P untuk belanja modal sebesar 0,002 < 0.05. Ini berarti terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara belanja modal terhadap belanja pemeliharaan. Jika dilihat dari pengujian statistik dimana t_{hitung} untuk belanja modal sebesar 3.327 > dari t_{tabel} yaitu sebesar 2.048. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Dengan kata lain menerima Hipotesis Nol (Ho) dan menolak Hipotesis Altenative (Ha)

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja modal belanja pemeliharaan. Hal ini sejalan dengan teori yang ada dimana belanja modal berbanding lurus dengan belanja pemeliharaan, jika belanja mengalami peningkatan maka belanja pemeliharan juga akan meningkat dan sebaliknya jika belanja modal mengalami penurunan maka belanja pemeliharaan juga mengalami penurunan. Selain itu belanja pemeliharaan juga dipengaruhi oleh faktor lainya seperti, kondisi perekonomian negara, stabilitas politik, tingkat inflasi dan suku bunga dan faktor eksternal lainnya

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh ***Bunari*** (2004) tentang perbandingan efesiensi biaya pemeliharaan kendaraan antara pemerintah kabupaten Solok dengan pemerintah daerah kabupaten agam. Selain itu penelitian ini juga didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ***David Harianto*** (2007) yang meneliti hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD

4.2.1 Perencanaan dan Pengendalian Belanja Pemeliharaan

Dalam merencanakan dan mengendalikan belanja pemeliharaan tidak terlepas dari merencanakan dan mengendalikan barang atau aset di setiap SKPD, hal ini sejalan dengan Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kota Solok juga menerapkan Permendagri No. 17 tahun 2007 untuk merencanakan dan mengendalikan Belanja Pemeliharaannya. Secara umum untuk membuat rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah harus mempedomani data barang yang ada dalam pemakaian pada masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam penyususnan RKA SKPD.

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang. Pemeliharaan barang milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalau dalam keadaan baik dan siap untuk

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

4.2.2 Perbandingan Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal di Kota Solok dan Kabupaten Solok

Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan oleh daerah setiap tahunnya merupakan implikasi dari dikeluarkannya sejumlah dana atau anggaran untuk memperoleh sejumlah aktiva tetap atau modal oleh daerah tersebut. Seiring diberlakukannya Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah mulai menerapkannya.

Daerah-daerah di Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda dan tentu saja dengan pendapatan daerah yang berbeda-beda pula. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh David Priyo Hadi (2006), pendapatan daerah perpengaruh positif terhadap belanja Modal. Maka peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu antar daerah yang cukup signifikan perbedaan belanja modalnya. Daerah yang dipilih yaitu Kabupaten Solok dengan Kota Solok.

Secara geografis kedua daerah ini berdekatan namun berbeda dalam hal kekayaan sumber daya dan pendapatannya. Kabupaten Solok secara gografis lebih luas dan dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan kemampuannya dalam membeli aktiva

tetap atau membiayai sejumlah proyek investasi, dimana dalam anggaran disebut belanja Modal.

Berikut adalah jumlah belanja modal Kabupaten Solok selama tiga tahun (2006-2008).

Tabel 4.6
Belanja Modal Kabupaten Solok
Tahun 2006 – 2008

Tahun	Jumlah
2006	61,152,595,032.00
2007	110,939,977,514.00
2008	100,630,615,995.00

Implikasi dari belanja modal adalah munculnya belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan bertujuan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Belanja pemeliharaan yang dianggarkan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah barang milik daerah. Jumlah Belanja Pemeliharaan yang di anggarkan oleh Kabupaten Solok selama tiga tahun tersebut adalah:

Tabel 4.7
Belanja Pemeliharaan Kabupaten solok
Tahun 2006 – 2008

Tahun	Jumlah
2006	24,613,281,735.00
2007	39,667,746,002.00
2008	29,519,198,871.00

Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah kenaikan belanja modal mempengaruhi belanja pemeliharaannya. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten/Kota di Sumatra Barat.

Sebagai pembanding penulis mengambil data Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan di Kota Solok. Secara geografis Kota Solok lebih kecil dibanding kabupaten Solok. Sebagian besar PAD nya diperoleh melalui sektor perdagangan dan jasa. Berikut adalah tabel belanja modal dan belanja pemeliharaan Kota Solok selama tiga tahun.

Tabel 4.8
Belanja Modal Kota Solok
Tahun 2006 – 2008

Tahun	Jumlah
2006	47,534,326,000.00
2007	74,507,148,000.00
2008	81,463,799,505.00

Tabel 4.9
Belanja Pemeliharaan Kota Solok
Tahun 2006 – 2008

Tahun	Jumlah
2006	11,959,344,546.00
2007	16,957,381,001.00
2008	24,404,012,153.00

Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan/penurunan belanja modal mempengaruhi belanja pemeliharaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan di kedua daerah ini belanja modal sangat mempengaruhi belanja pemeliharaannya. Hal ini sejalan dengan hipotesis dan hasil penelitian penulis. Selanjutnya terdapat perbedaan yang signifikan jumlah belanja modal Kabupaten Solok dengan Kota Solok yang berimplikasi terhadap jumlah belanja pemeliharaan di kedua daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berlakunya ketentuan atau kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi Pemda untuk mengelola keuangannya sendiri secara lebih efekif dan efisien dan memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan pembangunan daerahnya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan didasarkan pada anggaran yang ada. Terutama dalam mengatur dan megelola belanja modal, belanja barang dan belanja pemeliharaan.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu belanja modal terhadap variabel dependen yaitu belanja pemeliharaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD pemerintah Kota/ Kabupaten di Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Data diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regrsi linear dan korelasi .

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan dapat membuktikan hubungan yang signifikan antara belanja modal dan belanja barang terhadap belanja pemeliharaan, dengan kata lain menerima hipotesis nol (H_o) dan menolak hipotesis alternatif (H_a).

5.2. Saran

Dari keseluruhan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, kenyataannya belanja modal memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan, faktor perekonomian, tingkat inflasi, stabilitas politik, serta perbedaan tingkat kebutuhan daerah tiap tahunnya juga sangat menentukan atau berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan.

Bagi para peneliti lainnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam mengenai hubungan belanja modal terhadap belanja pemeliharaan, saran yang diberikan adalah diharapkan lebih memperluas objek penelitian atau memperbanyak sample dalam penelitiannya serta menambah variabel lainnya seperti belanja pegaawai dan belanja barang dan jasa agar hasil yang diharapkan lebih signifikan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai keterbatasan, antara lain adalah jumlah sampel yang digunakan masih sedikit jika dibandingkan dengan populasi yang ada, sehingga hasil yang didapat belum dapat menjawab secara akurat hasil penelitian. Disamping itu juga disebabkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh di pemerintah kota

dan kabupaten di Sumatera Barat tanpa memasukkan variable makro lainnya seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

LAMPIRAN 6

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

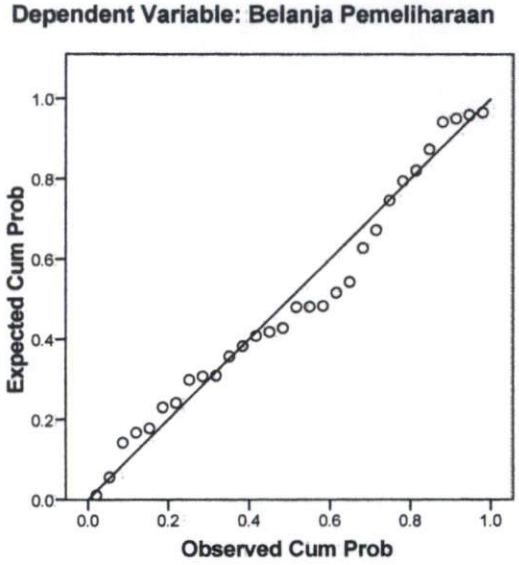

Histogram

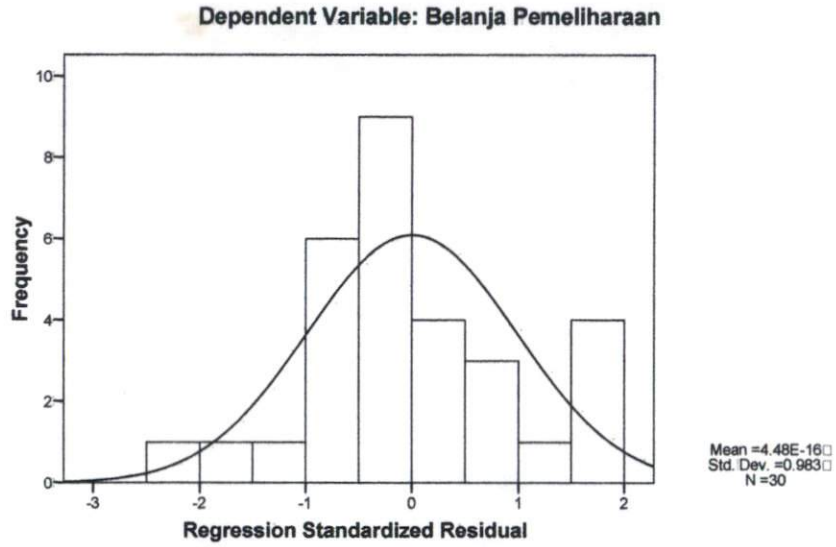

LAMPIRAN 5

Residuals Statistics [a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13279010.0000	39546580.0	23743827.37	5761120.679	30
Std. Predicted Value	-1.816	2.743	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	1702864.875	5045529.500	2301600.299	718670.707	30
Adjusted Predicted Value	10475544.0000	35134688.0	23544675.13	5603393.929	30
Residual	-21394314.000	16945968.0	.00000	9162492.531	30
Std. Residual	-2.294	1.817	.000	.983	30
Stud. Residual	-2.348	1.890	.010	1.023	30
Deleted Residual	-22397730.000	19056998.0	199152.24067	9955300.247	30
Stud. Deleted Residual	-2.572	1.987	.012	1.062	30
Mahal. Distance	.000	7.524	.967	1.486	30
Cook's Distance	.000	.382	.045	.089	30
Centered Leverage Value	.000	.259	.033	.051	30

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

LAMPIRAN 4

Model Summary [b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532[a]	.283	.258	9324673.13

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.6E+014	1	9.625E+014	11.070	.002[a]
	Residual	2.4E+015	28	8.695E+013		
	Total	3.4E+015	29			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

Coefficients [a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7037355	5302012		1.327	.195
	Belanja Modal	.162	.049	.532	3.327	.002

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

LAMPIRAN 3

Regression

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	30	38491744.26	200481576.50	103027367.51	35528332.22
Belanja Pemeliharaan	30	5671682.34	50203488.12	23743827.370	10823205.66
Valid N (listwise)	30				

Correlations

		Belanja Pemeliharaan	Belanja Modal
Pearson Correlation	Belanja Pemeliharaan	1.000	.532
	Belanja Modal	.532	1.000
Sig. (1-tailed)	Belanja Pemeliharaan	.	.001
	Belanja Modal	.001	.
N	Belanja Pemeliharaan	30	30
	Belanja Modal	30	30

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Modal[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.532[a]	.283	.258	9324673.13	.283	11.070	1	28	.002

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal

b. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan

LAMPIRAN 2

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan
N		30	30
Normal Parameters[a,b]	Mean	103027367.5	23743827.37
	Std. Deviation	35528332.22	10823205.66
Most Extreme Differences	Absolute	.098	.135
	Positive	.098	.135
	Negative	-.059	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.535	.738
Asymp. Sig. (2-tailed)		.937	.648

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran I

DATA BIAYA MODAL DAN BIAYA PEMELIHARAAN

DI 7 (TUJUH) KABUPATEN DAN 3 (TIGA) KOTA DI SUMATERA BARAT

DARI TAHUN 2006 - 2008

	Kab Solok	Kab.Pessel	Kab.Pdg Pariaman	Kab. Agam	Kab. Tanah Datar	Kab. 50 Kota	Kab. Pasaman	Kota Padang	Kota Solok	Kota Bukittinggi
tahun 2006										
Biaya Modal	61,152,595,032	102,251,208,000	84,604,593,125	38,491,744,264	73,638,403,120	79,270,410,004	72,205,728,356	82,478,000,521	47,534,326,000	59,937,937,458
Biaya Pemeliharaan	24,613,281,735	15,007,778,548	5,954,619,114	29,532,541,554	17,290,329,221	9,906,150,157	21,769,055,254	35,779,450,000	11,959,344,546	12,115,656,254
tahun 2007										
Biaya Modal	110,939,977,514	142,136,485,000	99,714,102,000	105,801,476,766	112,242,104,000	129,666,098,041	107,717,774,648	123,514,896,510	74,507,148,000	87,745,222,614
Biaya Pemeliharaan	39,667,746,002	47,031,561,001	22,801,576,000	24,567,344,000	20,541,222,082	19,056,458,012	21,085,341,056	5,671,682,341	16,957,381,001	14,700,148,341
tahun 2008										
Biaya Modal	100,630,615,995	154,241,219,859	148,494,489,385	146,629,299,439	133,793,468,918	200,481,576,530	101,212,574,900	136,066,296,151	81,463,799,505	92,257,454,330
Biaya Pemeliharaan	29,519,198,871	30,125,425,454	26,188,490,430	30,350,236,219	21,842,749,391	50,203,488,116	23,000,711,419	37,669,848,166	24,404,012,153	23,001,994,672

DAFTAR PUSTAKA

Admin, 2007. *Rekonstruksi Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Pontianak Dalam Suatu Model Akuntansi Baya Sektor Publik.* ***http://www.skripsi-tesis.com/rekonstruksi-anggaran-belanja pembangunan-kabupaten-pontianak-dalam-suatu-model-akuntansi-biaya-sektor-publik/*** *diakses 2 Februari 2010*

Bunari. 2004. *Perbandingan Efisiensi Biaya Pemeliharaan Kendaraan antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kabupaten Agam.* Universitas andalas.

Departemen Dalam Negri republik indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.* Jakarta, 2002.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta, 2006

Halim. Abdul. 2000. "*Anggaran Daerah dan "Fiskal Stree*" (sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357

Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita.* Simposium nasional akuntansi X.

Kasit Bambang Prakosa, 2004. "*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*". JAAI Volume 8 No. 2

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.* Jakarta, 2006

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi yogyakarta

.Priyo Hari Adi.2006 "*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah*" (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Supranto, j. 1993. *Statistic Teori Dan Aplikasi.* Penerbit Erlangga.

Syaiful. 2005. "*Pengertian dan perlakuan akuntansi Belanja barang dan belanja modal Dalam kaidah akuntansi Pemerintaha"n.* ***http://aset.pu.go.id/belanja.pdf*** *diakses 5 Januari 2010*

UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintaan Daerah

UU No. 25 Tahun 2000, tentang Peruimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Yurniwati. 2005. "*Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*". Fakultas Ekonomi Unveritas Andalas. Padang

Suandhi. 2005. *Kebijakan Pemerintah Vs Kesejahteraan Berkelanjutan.* ***http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2005/11/27/s1.html*** Diakses 5 Januari 2010